

Gangguan inovasi teknologi yang terkait dengan industri perbankan nampaknya semakin lama semakin sulit dihindari apalagi dihentikan. Pada awalnya pihak regulator di berbagai Negara beranggapan hanya sebagai fenomena biasa yang tidak perlu direspon secara berlebihan.

(Artikel telah dimuat di Majalah Infobank, Edisi Februari 2019)

Sejak ditemukan teknologi *blockchain* (teknologi buku besar yang di distribusikan) pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto (2009) para pengembang teknologi keuangan khususnya (*start up*) mempunyai motivasi untuk menciptakan alternatif sistem transaksi keuangan yang selama ini menjadi domainnya perbankan. Para pengembang memposisikan bahwa layanan perbankan adalah layanan yang tradisional. Awalnya mereka memperkenalkan mata uang alternatif berupa *cryptocurrency* (mata uang digital) disusul kemudian berupa *peer to peer* (P2P) baik dari sisi pinjaman, pembayaran, pendanaan dan transaksi. Apa yang mereka lakukan tersebut semakin dirasakan dampaknya bagi industri perbankan sehingga lahir sebuah

Ketika para inovator teknologi keuangan memperkenalkan mata uang digital (cryptocurrencies) yang semakin diminati masyarakat, timbul pertanyaan mengapa tidak Bank sentral juga mulai mengikutinya. Pertanyaannya bukan persoalan teknis lagi. Lebih kepada kapan saat yang tepat Bank Sentral mengeluarkan atau tidak mata uang digital.

era dengan sebutan *banking disruption*. Adanya mata uang digital (*cryptocurrency*) dan P2P mulai dirasakan semakin mengganggu terhadap bisnis perbankan. Inovasi para pembuat aplikasi keuangan (*start up*) semakin kreatif memperkenalkan layanan non perbankan misalnya mulai dari pemesanan hotel, tiket, berbelanja, transportasi dan berbagai bentuk layanan publik lainnya. Kehadiran itu semua mengawali era tersedianya alternatif layanan yang semakin mudah bagi masyarakat, termasuk dalam hal transaksi keuangan yang selama ini menjadi domainnya perbankan.

Gangguan inovasi teknologi yang terkait dengan industri perbankan nampaknya semakin lama semakin sulit dihindari apalagi dihentikan. Pada awalnya pihak regulator beranggapan hanya sebagai fenomena biasa yang tidak perlu direspon secara berlebihan. Namun sejalan dengan semakin besarnya gangguan yang dirasakan, pada akhirnya regulator dihadapkan pada pilihan untuk tetap konsisten atas apa yang telah berjalan selama ini atau justru sebaliknya mulai mengatur. Misalnya berkaitan dengan

menjamurnya P2P sudah banyak regulator di berbagai negara mulai menanganinya melalui berbagai peraturan terkait perijinan dan tata kelolanya.

Beberapa Bank Sentral telah mulai mempertimbangkan apakah mereka suatu saat mungkin akan mengeluarkan mata uang digital mereka sendiri. Ide ini bukan hal yang baru. Tobin (1985) misalnya, menyatakan perlunya suatu saat Bank Sentral memberikan akses yang lebih besar ke bentuk digital. Perhatian terhadap digital keuangan tentunya didasari kenyataan bahwa inovasi teknologi untuk sektor keuangan tidak bisa dihindari. Dilain pihak gerakan *cashless society* telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan penggunaan uang tunai. Tentunya tidak mungkin diabaikan sama sekali ketika semakin banyak *start up* yang memproduksi mata uang digital.

Mengapa uang digital diminati tentu banyak pertimbangannya. Karena mata uang tunai dengan digital memiliki perbedaan baik dalam akses maupun fleksibilitasnya. Saat ini, akses ke uang tunai ke dan dari Bank Sentral terbatas pada jam operasional secara tradisional yaitu kurang dari 24 jam sehari dan biasanya 5 hari dalam seminggu. Beberapa Bank Sentral sudah menyediakan penyelesaian *real-time* atau mendekati *real-time* dengan ketersediaan 24 jam dan 7 hari. Memang ada pengecualiannya, yaitu pembayaran ritel lintas batas, yang umumnya lebih lambat, kurang transparan dan lebih mahal daripada pembayaran ritel domestik (Lihat misalnya laporan CPMI-The Committee on Payments and Market Infrastructures CPMI, 2018).

Tentunya bukan karena persoalan ketersediaan dan kemudahan akses saja yang menjadi alasan mengapa Bank Sentral harus mulai gagasan untuk menerbitkan mata uang digital. Jika semakin banyak beredar mata uang digital ala swasta dan dilain pihak penggunaan uang tunai semakin kecil, maka pertanyaannya adalah untuk apa memegang uang tunai?. Kenyataan menunjukkan transaksi dengan uang tunai lebih banyak dilakukan untuk transaksi yang sifatnya ilegal. Bisa jadi mata uang digital yang dikelola swasta-karena minimnya pengawasan akan juga digunakan untuk transaksi yang ilegal. Dengan demikian bisa jadi suatu

Ada perkembangan baru yang menarik terkait mata uang digital dengan apa yang harus dilakukan oleh Bank Sentral. Salah satu hal yang menarik menurut hemat saya adalah adanya semacam kertas kerja (*working paper*) yang dibuat oleh Bank for International Settlements (BIS) Edisi Maret 2018 dengan judul Central Bank Digital Currencies (CBDC). Kertas kerja tersebut telah memberikan suatu pandangan yang semakin maju

terkait dengan mata uang digital dikaitkan dengan bagaimana seharusnya Bank Sentral menyikapinya. BIS berpendapat bahwa kehadiran mata uang digital harus mulai dipertimbangkan untuk diikuti oleh Bank Sentral. Kertas kerja BIS tersebut fokus menganalisis implikasi potensial penerbitan mata uang digital oleh Bank Sentral untuk sistem pembayaran dan implementasinya terkait dengan transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh BIS antara lain sebagai berikut;

Ketika suatu negara berhasil dalam menciptakan cashless society, maka pertanyaannya kira-kira untuk apa uang tunai diperlukan? Pada umumnya untuk transaksi ilegal

Pertama, semakin banyak dirasakan bahwa mata uang digital dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian untuk transaksi yang melibatkan efek dan derivatif. Beberapa Bank Sentral menganalisis bahwa mata uang digital dapat difungsikan sebagai instrumen pembayaran alternatif yang aman, kuat, dan nyaman. Hilangnya uang tunai yang digantikan dengan mata uang digital tetap dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Meskipun tujuan umum mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral sebagai alternatif untuk uang tunai, tetapi Bank Sentral harus memastikan terpenuhinya persyaratan anti pencucian uang dan kontraterorisme pembiayaan, dan tentunya memuaskan bagi masyarakat. Hal lain yang harus dipenuhi bahwa mata uang digital yang diterbitkan Bank Sentral dibedakan dari cadangan atau saldo penyelesaian yang dimiliki oleh bank komersial di Bank Sentral. Telah

Kedua, penerbitan mata uang digital oleh Bank Sentral mungkin tidak akan mengubah mekanisme dasar implementasi kebijakan moneter, termasuk penggunaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral. Meskipun telah ada mata uang digital, permintaan akan uang tunai tetap harus diakomodasi. Karena mata uang digital diterbitkan oleh Bank Sentral tentunya harus memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan mata uang digital swasta. Keunggulan atau daya tarik tersebut diperlukan agar menjadi pembeda yang nyata dengan mata uang digital lainnya. Misalnya dapat berfungsi sebagai aset (kekayaan) yang likuid dan layak kredit, tersedia untuk investor institusi yang mirip dengan cadangan Bank Sentral yang berbunga, adanya fasilitas repo, dan dapat diperdagangkan.

Ketiga, setiap langkah menuju kemungkinan peluncuran penerbitan mata uang digital oleh Bank Sentral harus tunduk pada pertimbangan yang cermat dan menyeluruh. BIS menyatakan bahwa penelitian lebih lanjut tentang efek yang mungkin terjadi pada suku bunga, struktur intermediasi, stabilitas keuangan dan pengawasan keuangan diperlukan. Efek pada pergerakan dalam nilai tukar dan harga aset lainnya sebagian besar tetap tidak diketahui dan juga perlu eksplorasi lebih lanjut. Secara lebih umum, Bank Sentral harus melanjutkan pemantauan mereka terhadap inovasi digital dan terus meninjau bagaimana operasi mata uang digital yang ada apa kelemahannya. Saat ini, penilaian umum terhadap mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak swasta adalah tidak stabil, minimnya perlindungan investor dan konsumen, dan belum dianggap aman.

Keempat, argumen yang lebih persuasif adalah bahwa mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral dapat membantu semakin efektifnya menjaga hubungan langsung antara Bank Sentral dengan warga negaranya. Ketika penggunaan uang tunai semakin kecil, dan masyarakat semakin dominan menggunakan jasa layanan non perbankan termasuk uang digital, maka pemahaman masyarakat akan fungsi dan peran Bank Sentral semakin menurun dan bahkan mungkin beranggapan tidak memerlukannya lagi.

Ketika saya berkesempatan studi banding kebeberapa bank di Swedia, Norwegia dan Denmark misalnya, dinyatakan bahwa transaksi non tunai sudah di atas 90 persen, bahkan diperkirakan akan mencapai 97 persen ketika produk berbasis P2P merebak. Suatu tren yang akan terjadi di semua Negara karena selain kebutuhan juga konsekuensi dari inovasi teknologi yang pesat. Sesuatu yang juga tidak bisa dihindari, termasuk oleh Bank Sentral dan Lembaga Pengawas Keuangan. Sangat tepat sekiranya Mersch (2007) berpendapat bahwa adanya mata

Persoalannya jangan sampai dimuarakan kepada kesimpulan bahwa lebih banyak kesulitannya.

Ketika peralatan komunikasi semakin canggih misalnya, selalu diawali kesulitan untuk menggunakannya. Kadang tombol didepan mata serig kita cari.

Kita tidak punya pilihan menentang kemajuan teknologi. Sebab segala sesuatu itu pada awalnya sulit sebelum menjadi mudah pada akhirnya

uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral dapat membantu mendorong pemahaman publik tentang peran Bank Sentral dan kebutuhan akan independensinya.

Beberapa Catatan

Pemikiran bahwa suatu saat Bank Sentral akan menerbitkan mata uang digital, pada awalnya memang menjadi isu yang mengada-ada. Kemudian ketika ada suatu kajian bahwa Bank Sentral ada baiknya juga memiliki uang digital, bisa saja tetap dikategorikan mengada-ada. Sekalipun kertas kerja BIS menyatakan bahwa salah satu alasan untuk memperkenalkan mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral adalah dalam rangka menyediakan instrumen Bank Sentral yang aman, terutama jika penggunaan uang tunai menurun secara signifikan. Apakah penurunan penggunaan uang tunai akan berlanjut? Sudah pasti.

Tentunya kertas kerja BIS mengenai mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral sudah dipelajari oleh semua Bank Sentral. Memang tidak semudah para perusahaan *start up* untuk merealisasikannya. Ada beberapa catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bank Sentral dan Lembaga Pengawas Keuangan terkait dengan wacana mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral, antara lain sebagai berikut;

Pertama, masalah legalitas utamanya perundangan dan peraturan yang sudah ada. Eksperimen awal telah mengidentifikasi sejumlah masalah hukum, teknis dan operasional yang harus dipertimbangkan oleh Bank Sentral dan pihak terkait lainnya sebelum menerbitkan mata uang digital. Sebagian besar Bank Sentral belum memiliki otoritas untuk mengeluarkan mata uang digital karena ada kaitannya dengan Bank Sentral dan UU Perbankan yang harus disesuaikan. Sementara itu belum ada, maka akan menimbulkan pertanyaan apakah mata uang digital dari Bank Sentral dapat menjadi alat pembayaran yang sah? Demikian juga konsekuensi transaksi melalui antar Negara terkait transfer misalnya. Karakteristik mata uang digital yang berbasis *blockchain* tidak ada batasan geografis dan waktu.

Hal lain yang tentunya menjadi catatan penting terkait kewenangan Bank Sentral dalam mengeluarkan suatu kebijakan baik berupa ketentuan dan atau semacam surat edaran saat ini. Dalam memutuskan untuk menerbitkan mata uang digital, Bank Sentral harus mempertimbangkan terkait dengan solusi pembayaran, kliring dan penyelesaiannya. Ancaman dunia maya, seperti *malware*, dan penipuan adalah risiko bagi hampir setiap sistem pembayaran, kliring dan penyelesaiannya. Selain itu, efek potensial dari penipuan bisa lebih signifikan karena kemudahan dalam jumlah besar yang dapat ditransfer secara elektronik. Oleh sebab itu adanya metode mitigasi risiko *cyber* yang kuat akan menjadi prasyarat untuk penerbitan mata uang digital oleh Bank Sentral,

Kedua, terkait dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Bank Sentral biasanya memiliki persyaratan operasional yang sangat ketat untuk sistem dan layanan mereka. Beberapa teknologi yang diusulkan untuk menerbitkan dan mengelola mata uang digital relatif masih belum teruji. Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam kaitannya dengan teknologi yang terkait dengan pengelolaan uang.

Mengutip pendapat Green (2008) dan Mersch (2017) uang biasanya didasarkan pada salah satu dari dua teknologi dasar, yaitu dalam bentuk token (nilai tersimpan) atau akun. Uang tunai dan banyak mata uang digital berbasis token, sedangkan saldo dalam akun cadangan dan sebagian besar bentuk uang bank komersial berbasis akun. Menurut Kahan dan Roberds (2009) perbedaan utama antara uang berbasis token dan akun adalah bentuk verifikasi yang diperlukan ketika ditukar. Uang berbasis-token sangat bergantung pada kemampuan penerima pembayaran untuk memverifikasi validitas objek pembayaran. Dengan mata uang digital kekhawatirannya adalah pemalsuan. Dilain pihak secara universal di dunia digital yang dikhawatirkan adalah apakah token atau koin itu asli atau tidak (baca: pemalsuan elektronik) dan apakah itu sudah dibelanjakan. Kekhawatiran lain yang berkaitan dengan uta pencurian identitas, yang memungkinkan pelaku untuk mentransfer atau menarik uang dari akun tanpa izin. Apakah perundangan, peraturan dan perijinannya sudah memungkinkan? Sekiranya belum tentunya memerlukan waktu untuk melakukan penyempurnaannya.

Ketiga, yang terkait dengan dampaknya terhadap bisnis model perbankan. Bagaimanapun juga ketika Bank Sentral menerbitkan mata uang digital, akan ada konsekuensi terhadap pola intermediasi keuangan pada bank-bank komersial. Sekedar ilustrasi dalam perpindahan aliran dana deposito ke mata uang digital misalnya. Hal ini akan menyebabkan pihak bank untuk berupaya mencegah kehilangan simpanan tersebut dengan menaikkan suku bunga. Dampak lanjutannya tentu akan meningkatkan suku bunga kredit yang mungkin akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi lainnya akan ada kemungkinannya juga Bank Sentral memberlakukan tambahan agunan ketika Bank Sentral memiliki beberapa aset yang kurang likuid dan berperingkat lebih rendah untuk mengakomodasi penerbitan mata uang digital.

Kembali kepada persoalan apakah Bank Sentral suatu saat akan menerbitkan Bank Sentral tentunya harus disikapi secara obyektif. Persoalannya jangan sampai dimuarakan kepada kesimpulan bahwa lebih banyak kesulitannya. Sebab segala sesuatu itu pada awalnya sulit sebelum menjadi mudah. Ketika peralatan komunikasi semakin canggih misalnya, selalu diawali kesulitan untuk menggunakannya. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, maka yang sulit tersebut menjadi mudah pada akhirnya.